

# STRATEGI MEDIA RELATIONS POLITISI PEREMPUAN DPRD JAWA TENGAH UNTUK MEMPERKUAT AKUNTABILITAS KERJA LEGISLATIF

Muchammad Yuliyanto, S.Sos,M.Si

## **Abstract**

*Media relations play an important and strategic role for female politicians in running their jobs as legislators in Central Java Parliament. Media has ability to drive as well as a means to realize the accountability of legislative work in order to make public aware and respond their work. Moreover, the legislators are responsible to show their accountability to the public. That is the reason why media play such important role as an agent of socialization of politicians's work and as communication medium between politicians and their constituents.*

*This study aims to examine female politician's strategies and activities in media relations in order to strengthen their works accountability in Central Java Parliament. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected by in-depth interview technique.*

*The results showed there were two strategies media relations of the female politicians. First, personal strategy which is women politicians effort to build direct, communicative, and media relations, communicative and anytime media relations that produce symbiotic mutualism. Second, the institutional strategy that was facilitated by secretariat of Central Java parliament bureau build media relations between women politicians and the media or journalists to support the accountability of legislative work.*

*Keywords: media relations, accountability, the functions of Parliament*

## **A. Pendahuluan**

Kebijakan afirmatif tentang 30 persen kuota bagi perempuan dalam perpolitikan termasuk upaya untuk mendorong kesetaraan gender bagi tampilnya perempuan. Meski belum terpenuhi target namun hasil Pemilu 2014 jumlah caleg perempuan terpilih di DPRD Jawa Tengah mencapai 23 persen. Pengalaman selama lima tahun lalu politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah masih jauh dari pria terkait ekspose media pada saat menjalankan kerja-kerja legislatif terutama yang berhubungan dengan fungsi legislatif. Elektabilitas politisi perempuan menunjukkan apresiasi sekaligus dukungan kepercayaan konstituen untuk merepresentasikan ekspektasi, aspirasi bahkan tanggungjawab politik kepada masyarakat di daerah pemilihan (dapil). Perhelatan politik saat proses pemilu 2014 amat kompetitif sehingga membutuhkan dukungan opini publik bagi politisi perempuan selaku calon anggota legislatif (caleg). Apalagi jenis pemilih yang masih mudah dikendalikan via media sejak sosialisasi sampai persuasi melalui iklan politik memberi ruang bagi perempuan ikut berkompetisi di dalamnya meski dalam porsi yang terbatas. Dalam hal ini fungsi media dalam politik sebagaimana pandangan Mc Quail (1996:70) menjalankan fungsi informasi yakni agen yang menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi (perpolitikan) sehingga memudahkan inovasi, adaptasi, respon dan kemajuan bagi masyarakat.

Politisi perempuan selaku anggota DPRD Jawa Tengah harus menindaklanjuti keterpilihannya dengan menjalankan tugas legislatif sebagai perwujudan kerja perwakilan masyarakat dalam mengelola kebijakan yang bertujuan memajukan dan menyejahterakan rakyat. Adapun tugas legislatif sebagaimana UU Pemilu No.8 Tahun 2012 meliputi: (1) legislatif terkait penyusunan peraturan dan regulasi kebijakan; (2) budgeting yakni menyusun RAPBD selaku perencanaan anggaran dan keuangan untuk pembangunan dan (3) controlling yakni pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan. Kerja legislatif dalam praktik selalu mengacu kepada ketiga fungsi tersebut dan diderivasikan dalam banyak aktifitas kedewanan. Follow up pasca keterpilihan

perempuan menjadi anggota DPRD adalah mempertanggungjawabkan secara politik kerja legislatif tersebut kepada konstituen termasuk di dapilnya. Salah satu instrumen untuk pertanggungjawab anggota dewan adalah melalui ekspose media massa. Apalagi media juga memiliki fungsi korelasi yakni agen untuk melakukan sosialisasi dan mengkoordinasi beberapa aktifitas, menjelaskan dan mengomentari makna dari peristiwa dan informasi (Mc Quail,1996:70). Dalam hal ini media dapat dimanfaatkan politisi perempuan untuk mendekatkan hasil kerja legislatif kepada masyarakat sebagai upaya mempertanggungjawabkan kerjanya.

Berikutnya bagi politisi perempuan selaku anggota DPRD untuk meningkatkan eksistensi saat menjalankan kerja amat membutuhkan dukungan media. Pada konteks komunikasi politik maka tindakan maupun pesan politik akan menjadi opini maupun pesan yang memperoleh respon publik apabila memperoleh dukungan ekspose media. Media sebagai the fourth estate of democracy sesungguhnya adalah menempatkan media sebagai katalisator diantara institusi fundamen demokrasi yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Media dapat dijadikan institusi yang menjalankan fungsi amplifikasi bagi tindakan dan pesan politik yang disampaikan politisi. Bahkan kebijakan maupun regulasi produk legislatif dapat diaksentuasi kepada institusi pemerintah juga melalui media. Termasuk kerja pengawasan DPRD kepada pemerintah provinsi maupun pengawasan publik terhadap kinerja politisi DPRD dapat dilakukan media massa. Oleh karenanya aktifitas politik termasuk kerja legislatif politisi perempuan tidak akan dapat dilepaskan dari fungsi kehadiran media.

Pada konteks mempertanggungjawabkan kerja legislatif politisi perempuan DPRD Jawa Tengah maka membutuhkan media untuk menyosialisasikan sekaligus membentuk opini publik terkait apa yang telah dilakukan selaku perwakilan rakyat. Dengan demikian selaku politisi perlu menyiapkan strategi *media relations* agar dapat menjadi *news maker* tentang aktifitas dan kebijakan yang dihasilkannya. Apalagi media memiliki news value yang selalu dijadikan parameter untuk menyeleksi informasi dari anggota DPRD dinilai layak ekspose ke ranah publik. Kualitas kerja dan kapasitas politisi selaku wakil rakyat selama ini dapat diketahui melalui ekspose media. Karena itu menjadi strategis bagi politisi perempuan selaku anggota DPRD Jawa Tengah memiliki relasi dengan wartawan atau media dalam rangka simbiosis mutualisme selama lima tahun menjalankan kerja legislatif yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan riset ilmiah yang akan menjelaskan strategi media relations yang dilakukan politisi perempuan DPRD Jawa Tengah dalam menjalankan kerja legislatif agar supaya memperoleh dukungan cover media sehingga dapat diketahui masyarakat selaku konstituen yang telah mempercayakan dalam pengelolaan masa depan Provinsi Jawa Tengah.

## **B. PEMBAHASAN**

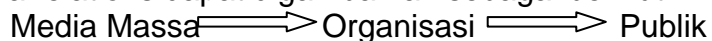
### **Media relations dan DPRD**

kehadiran praktik politik dalam demokrasi yang ditunjukkan dari pilar legislatif membutuhkan dukungan media massa. Keberhasilan komunikasi politik sebagai sarana menyebarkan gagasan, harapan, janji dan aktifitas politik apada realitasnya amat ditentukan peran dan fungsi media di dalamnya. Apalagi bahwa aktifitas politik tidak akan terlepas dari opini publik dan respon stakeholders sehingga membutuhkan kerjasama dengan media massa yang merupakan instrumen untuk mendiseminsaikan pesan-pesan politik maupun tindakan agar diketahui publik. Hal ini sebagaimana pandangan Mc Quail (1996:70) tentang fungsi media massa

adalah: (1) fungsi informasi dalam rangka mendiseminasikan informasi kepada publik untuk menjadi wacana maupun pengetahuan umum; (2) fungsi korelasi untuk menyosialisasikan sekaligus ,mengoordinasikan beberapa aktivitas (politik), menjelaskan dan menginterpretasikan makna dari peristiwa; (3) fungsi kesinambungan dalam rangka meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai di tengah masyarakat seperti demokrasi. Disamping itu media juga sering menjalankan fungsi amplifikasi yakni ikut memperkuat gaung atau perluasan peristiwa dan aktivitas (politik) agar dijadikan prioritas dalam pengambilan keputusan dan apresiasi masyarakat. Terkait kerja legislatif maka fungsi aksentuasi media menjadi amat strategis karena media ikut memperkuat desakan atau urgensi sebuah persoalan yang menjadi harapan atau kritik masyarakat, termasuk anggota dewan.

Oleh karena itu menjadi amat strategis bagi politisi perempuan DPRD Jawa Tengah untuk membangun hubungan media dalam rangka memperoleh dukungan penguatan kerja-kerja legislatif selaku wakil rakyat. Media relations menjadi salah satu kebutuhan utama bagi politisi untuk menciptakan eksistensi sekaligus sarana mempertanggungjawabkan politik atas kerja legislatif kepada masyarakat selaku konstituennya. Informasi dan opini publik yang dikonstruksi media terkait tindakan dan kebijakan politisi perempuan harus mendapatkan cover media agar dapat mendorong kinerja sekaligus kesetaraan posisi di hadapan media pada saat menjalankan aktivitas politiknya. Adapun kerja legislatif selaku anggota DPRD meliputi: (1) menjalankan fungsi legislasi yakni fungsi dewan melalui kerja membuat aturan atau regulasi yang akan dilaksanakan pemerintah selaku lembaga eksekutif; (2) melaksanakan fungsi budgeting yakni menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan (3) melaksanakan fungsi kontrol yakni mengawasi kerja pemerintah dalam melaksanakan kebijakan maupun tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan strategi media relations amat dibutuhkan anggota DPRD selaku politisi termasuk dari perempuan, agar kerja legislatif tersebut dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas selaku politisi melalui ekspose media.

Adapun terkait dengan *media relations* maka dapat diketahui elemen mendasar didalamnya (Iriantara,2005:29) yakni bahwa media relations itu berkenaan dengan media komunikasi dan menjadi sarana sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Tujuannya untuk keberhasilan program yang diperjuangkan selaku anggota legislatif. Kemudian media relations juga berkenaan dengan pemberian informasi atau member tanggapan pada media pemberitaan atas nama organisasi atau pribadi (klien). Sehingga media relations menjadi kebutuhan khusus bagi politisi perempuan dalam rangka memperkuat kerja legislatif selaku wakil rakyat di parlemen. Secara sederhana maka arus komunikasi dalam media relations dapat digambarkan sebagai berikut:



(Sumber : Iriantara,2005:31)

DPRD sebagai institusi yang merepresentasikan rakyat selalu berhubungan resiprokal dengan media massa terkait penyampaian informasi maupun tindakan politik dari para anggotanya. Apapun tindakan dan statemen anggota dewan merupakan informasi yang memiliki *news value* bagi media karena memiliki relasi dengan kepentingan publik. Berbagai fungsi media dapat dijalankan dengan menempatkan institusi legislatif dan anggotanya sebagai salah satu news maker. Sedangkan publik selaku stakeholder yang berhubungan dengan para wakil rakyat juga berhubungan resiprokal dengan media sebagai sarana mengakses informasi

sekaligus kanalisasi respond an aspirasi publik agar sampai kepada para politisi selaku anggota dewan. Sementara yang bisa terjadi relasi publik dengan DPRD tidak dapat berlangsung secara resiprokal karena kendala adminsitratif maupun sistem yang rumit sehingga mempersulit relasi resiprokal selaku konstituen dari anggota dewan.

Menurut Jefkins (dalam Nurudin, 2008: 54-57) dalam berhubungan dengan media, sangat penting untuk mengetahui hal-hal berikut ini:

Pertama, kebijakan redaksi. Ini terkait dengan visi dan misi media. Hal ini bisa diketahui dengan menanyakan langsung ke redaksi atau dengan memperhatikan model pemberitaan. Kedua, frekuensi terbit. Rutinitas atau frekuensi terbit terkait dengan seberapa cepat kita berharap media tersebut memuat berita tentang kita. Ketiga, batas waktu. Dengan mengetahui batas waktu, kita bisa memperkirakan kapan sebaiknya mengirimkan sebuah materi berita dan kapan bisa menghubungi jurnalis media tersebut. Keempat, proses cetak. Proses cetak berpengaruh terhadap kualitas cetakan. Kelima, jangkauan sirkulasi. Dengan mengetahui jangkauan sirkulasi, kita bisa tahu sejauh mana materi berita dari media tersebut dikonsumsi masyarakat. Keenam, profil pembaca. Profil pembaca berisi data demografis, psikografis, demografis, hingga gaya hidup pembaca. Ketujuh, metode distribusi. Bagaimana media tersebut sampai ke tangan konsumennya. Apakah langganan, eceran, dijual di terminal, toko, atau seperti apa.

Adapun langkah media relations secara operasional dapat dilakukan antara lain:

*Pertama*, pengumpulan fakta bisa dilakukan dengan penelitian, analisis pemberitaan media atau membaca tren pemberitaan. *Kedua*, merumuskan permasalahan yang akan direspon maupun disampaikan melalui media. *Ketiga*, perencanaan dan penyusunan program yang menunjukkan bahwa kegiatan media relations merupakan kebutuhan intensional dan *keempat* adalah menjalankan rencana tersebut melalui aktivitas dan komunikasi dengan media massa (dlm Iriantara;32). Oleh sebab itu menjadi keperluan strategis bagi politisi perempuan untuk menyiapkan strategi media relations sebagai panduan dalam membangun aktivitas berhubungan dengan media massa.

### **Politik dan Kekuasaan Dalam Pandangan Perempuan**

Selanjutnya argumentasi dasar perempuan ketika memasuki dunia politik dan menjadi politisi di DPRD Jawa Tengah ternyata amat variatif.,diantaranya: *pertama*, politisi perempuan sebelum terjun ke dunia politik adalah figur aktifis organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan gerakan perempuan. Oleh karena itu pengalaman berorganisasi menjadi modal dan motivasi untuk memasuki dunia politik. Misalnya pengurus Fatayat NU, Muslimah NU, Aisyiyah, Komite Perempuan Partai Golkar sampai aktivis gender dari kampus. Argumentasi ini sejalan dengan teori organisasi yang menjelaskan organisasi sebagai suatu ruang yang memberi kesempatan anggota untuk belajar dan mengembangkan potensi untuk memenuhi kepentingan anggota maupun organisasinya. Salah satu cara untuk memenuhi kepentingan anggota maupun masyarakat secara luas adalah melalui politik sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan.

*Kedua*, bahwa perempuan yang memasuki dunia politik kemudian menjadi politisi dipengaruhi faktor afiliasi politik keluarga yang telah lama dibangun bahkan dipersiapkan. Selanjutnya sebagai perempuan yang hidup dalam keluarga berafiliasi ke partai politik tertentu telah menginspirasi untuk ikut aktif di dunia politik. Afiliasi ini makin signifikan ketika faktor keturunan atau trah politik keluarga (dinasti politik)

melekat di dalamnya, sehingga seorang perempuan dalam keluarga tinggal melanjutkan aktivitas perpolitikan.

*Ketiga*, perempuan yang menjadi politisi juga dipengaruhi afiliasi politik organisasi kemasyarakatan sebagai media berinteraksi sosial yang intensif serta membangun kebiasaan hidup berjamaah. Sehingga ketika menjadi tokoh di dalam organisasi kemasyarakatan akan didorong masuk ke dunia politik karena memiliki jaringan luas sebagai modal dalam menekuni politik. Hal demikian sebagaimana teori jaringan dari Peter R. Monge & Noshir S. Contractor yang mendefinisikan jaringan sebagai struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi antara sejumlah individu dan kelompok (dlm Littlejohn dan Foss h.260-261). Misalnya anggota Fatayat maka masuk menjadi caleg PKB, atau anggota Aisyiyah lalu masuk caleg PAN. Disamping terdapat dukungan penuh anggota keluarga, terutama suami dan anak-anaknya kepada seorang ibu untuk masuk dunia politik.

*Keempat*, alasan perempuan adalah untuk memenuhi *balancing gender* dalam politik sesuai regulasi afirmatif yang mewajibkan kehadiran perempuan sebesar tiga puluh persen dalam struktur kepengurusan partai, caleg yang mengantarkan keterwakilan tiga puluh persen perempuan dalam lembaga legislatif. Artinya dalam rangka memenuhi keseimbangan eksistensi relasi perempuan dengan laki-laki dalam perpolitikan. Dan kemila, bahwa politik sebagai instrument agar supaya dapat melayani lebih banyak orang sekaligus mewujudkan angan-angan (idealisme) politik maka harus masuk ke dalamnya. Hal demikian lebih mengedepankan pendekatan fungsional yang menjadi aktivitas politik dan kekuasaan sebagai sarana mewujudkan cita-cita dan pelayanan kepentingan publik.

Relasi gender dalam politik maka perlu diketahui tentang positioning yang menunjukkan eksistensi dan peran politisi perempuan dalam dinamika politik seperti di parpol atau DPRD masih jauh dari keseimbangan relasi gender dalam praktik keseharian. Realitas menunjukkan perempuan selalu ditempatkan pada nomor "sepatu" artinya dalam pengaturan skala prioritas keterpilihan atau jabatan structural partai maka berada di nomor 2, 3 atau 4. Hal ini karena posisi utama selalu didominasi laki-laki saat penentuan struktur kepengurusan atau penempatan formasi calon legislatif menjelang pemilihan umum. Kondisi demikian juga amat minim memperoleh perhatian atau dukungan media sebagai sarana sosialisasi kebijakan politik kepada masyarakat maupun control atas kesetaraan gender dalam perpolitikan Indonesia.

Kemudian, secara spesifik dalam pandangan politisi perempuan maka politik adalah sarana menyalurkan hobby, kebiasaan dan gagasan yang berhubungan dengan kehidupan perempuan di tengah masyarakat. Apalagi saat menjadi aktifis organisasi kemasyarakatan maka seorang perempuan dapat memahami posisi dan perlakuan terhadap perempuan dari perspektif kebijakan atau regulasi yang dirasakan langsung perempuan. Misalnya: anggaran pro perempuan disamping itu sesungguhnya politik juga sebagai sarana memenuhi harapan dan kepentingan sebagian masyarakat yang telah mendorong untuk masuk ke politik dan menjadi politisi. Terdapat pula pandangan politik sebagai sarana memperoleh kekuasaan secara sah untuk mewujudkan berbagai kepentingan. Disamping politik juga sebagai strategi untuk mewujudkan gagasan melalui pengambilan kebijakan di legislative. Hal ini sesuai pendapat Lasswell bahwa politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana caranya. (1963; dlm Anwar Arifin;2011;3). Politisi perempuan melakukan aktivitas politik untuk mendapatkan kekuasaan melalui anggota legislatif DPRD Jawa Tengah untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun masyarakatnya.

## **Arti Penting Media bagi Politisi Perempuan**

Demokrasi sebagai satu sistem politik maka terdapat pandangan bahwa media adalah kekuatan keempat (*The Fourth Estate of Democracy*) di luar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena media dinilai memiliki peran dan kekuatan untuk mendinamisasikan kehidupan politik dan kekuasaan. Termasuk politisi perempuan sebagai agen dalam aktivitas politik dan kekuasaan yang menjalankan tugas kedewanan di DPRD Jawa Tengah tidak akan lepas dari relasi media di dalamnya. Adapun arti penting media bagi politisi perempuan dalam memperkuat akuntabilitas kerja di DPRD dapat dieksplanasikan berikut: (1) Media sebagai sarana menyosialisasikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan politisi perempuan di DPRD sebagai cara untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) kinerja selama lima tahun sebagai anggota legislatif.

Kemudian (2) media dapat juga dijadikan sarana uji kompetensi atas kemampuan kerja politisi perempuan selaku wakil rakyat di DPRD melalui apa yang disampaikan dalam pemberitaan media. Dalam hal ini media menjalankan fungsi agenda setting dalam wujud isi pemberitaan tentang aktivitas maupun kinerja politisi perempuan di DPRD. Sebagai contoh, penilaian tentang kemampuan bicara politisi perempuan dalam menyampaikan pandangan fraksi, atau pernyataan seorang politisi perempuan tentang anggaran peningkatan kesehatan ibu dan anak. (3) media dapat dijadikan sarana pengawasan bagi politisi perempuan selaku wakil rakyat untuk menyampaikan control dan kritik maupun ide-ide kepada pemerintah selaku lembaga eksekusi dari kebijakan produk legislatif.

Berikutnya (4) media sebagai sarana memperoleh *feedback* dari masyarakat lewat pemberitaan media yang mengambil pendapat atau respon masyarakat. Jadi media dijadikan sarana kanalisasi pendapat dan respon masyarakat terhadap aktivitas maupun produk kebijakan lembaga legislatif seperti DPRD Jawa Tengah. (5) media sebagai ruang untuk memperkuat diskusi dan pembicaraan bersama masyarakat melalui apa yang telah disampaikan media melalui pemberitaan. Sehingga menempatkan media sebagai ruang publik (*public sphere*) yakni ruang untuk mendiskusikan pendapat atau aspirasi masyarakat dengan para politisi perempuan.

Dan (6) arti penting media bagi politisi perempuan berikutnya adalah pembentukan opini publik Media sebagai sarana komunikasi pribadi politisi perempuan dengan konstituen di masyarakat (*grassroot*) untuk membangun opini publik tentang apa yang telah dikerjakan selaku anggota legislatif yang dapat dijadikan bahan perbincangan umum. Disamping itu (7) media dapat membantu menyampaikan visi, misi, program dan citra partai politik maupun lembaga legislative agar menjadi pengertian masyarakat selaku konstituen. Adapun media yang dirasakan lebih dominan mendukung akuntabilitas kerja politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah selama ini adalah media cetak, karena masyarakat dilihat masih lebih memperoleh informasi dari media cetak seperti surat kabar Suara Merdeka, Jawa Pos, Jateng Pos, Tribun dan Solopos.

## **Strategi Media Relations Politisi Perempuan**

Untuk memperkuat kerja legislatif politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah, ketika menilai media memiliki peran strategis maka harus memiliki strategi untuk membangun media relations. Ekspose kerja legislatif pada media merupakan salah satu wujud akuntabilitas tersebut. Definisi strategi menurut Thomas L Wheler adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana seseorang atau lembaga akan mencapai misi dan tujuannya (dlm Riant Nugroho, 2010:40). Berhubungan

dengan media bagi politisi perempuan membutuhkan strategi agar tercapai tujuan relasi yakni *simbiosis mutualisme* yang menguntungkan bagi kedua pihak. Adapun strategi politisi perempuan dalam media relations guna memperkuat kerja legislatif adalah sebagai berikut:

*Pertama*, strategi secara personal yang dilakukan politisi perempuan adalah membangun komunikasi antar pribadi dengan wartawan atau awak media secara baik dalam kondisi apapun (pada saat ada peliputan ataupun tidak ada peliputan tentang anggota dewan). Strategi ini diperkuat secara teknis dengan kepemilikan *contact person* antara politisi perempuan dengan para wartawan yang meliput di gedung DPRD.

*Kedua*, strategi secara institusional adalah sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan dua program untuk mendukung penguatan akuntabilitas kerja anggota legislative, antara lain: (1) dialog interaktif melalui media elektronika maupun forum pertemuan dengan wartawan atau dikenal *journalist gathering*, adapun yang (2) mengadakan *media gathering* berujud forum pertemuan berkala tiga bulan sekali antara anggota dewan dengan pengelola redaksi, dan (3) menyediakan *press room* di lantai dasar gedung DPRD untuk memudahkan pertemuan maupun fasilitasi kerja para wartawan.

Selanjutnya *ketiga*, dukungan untuk media relations dari lembaga partai politik atau fraksi di DPRD dalam mendukung akuntabilitas kerja politisi, masih amat minim. Hal ini karena institusi partai dan fraksi dewan belum menganggap penting sehingga tidak dilembagakan secara formal dan kontinyu arti penting media relations bagi para politisi menjalankan tugasnya. Media relations masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder bagi para politisi dalam rangka penguatan akuntabilitas kerja di DPRD selama ini.

*Keempat*, menyelenggarakan aktifitas media gathering dengan kegiatan refreshing bersama wartawan yang difasilitasi sekretariat DPRD bekerjasama dengan Biro Humas Pemprov, misalnya: *outbond* bersama wartawan atau makan siang bersama.

*Kelima*, politisi perempuan hampir tidak pernah melakukan aktivitas media relations secara sadar dan direncanakan, seperti: konferensi pers, press release atau media gathering. Politisi perempuan lebih pasif dan bahkan menunggu inisiatif dari para wartawan, sehingga amat jarang berinisiatif untuk membangun media relations. Bahkan dalam keseharian politisi perempuan merasakan lebih dekat dengan wartawan perempuan dan lebih mudah berinteraksi. Namun demikian relasi dengan wartawan laki-laki tetap berjalan lancar. Disamping itu tidak terdapat diskriminasi gender dalam media relations yang telah berlangsung di DPRD Jawa Tengah.

*Keenam*, politisi perempuan juga memberi kemudahan bagi wartawan untuk mengakses kepada pribadi politisi bersangkutan, misalnya: kemudahan bertemu saat dan dimanapun atau melalui telepon, BBM sampai pemanfaatan email. Disamping strategi kompetensi pribadi dengan menyiapkan diri untuk menguasai materi apapun yang berhubungan dengan kerja kedewanan (terutama di keanggotaan komisi tertentu).

### **Peran Media Dalam Memperkuat Akuntabilitas Kerja Politisi Perempuan**

Konsep akuntabilitas yang diartikan sebagai pertanggungjawaban kerja politisi perempuan dalam menjalankan tugas kedewanan kepada masyarakat selaku konstituen yang telah mempercayakan kepada dirinya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dijumpai oleh media yang dinilai merupakan sarana yang dapat menyampaikan dan menghubungkan kegiatan maupun kerja kedewanan agar

diketahui masyarakat secara luas. Akuntabilitas kerja politisi perempuan direalisasikan salah satunya melalui masa reses serta kegiatan berkomunikasi langsung dengan konstituen (di daerah pemilihan) dan selalu bersama wartawan agar dapat dijadikan laopran pemberitaan yang akan diketahui masyarakat secara luas.

Peran media sebagai sarana mendukung akuntabilitas kerja politisi perempuan tidak dapat maksimal karena kemampuan politisi perempuan menciptakan *news value* masih lemah, kecermatan dan respon terhadap wartawan masih minim sehingga amat jarang politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah menjadi *newsmaker* terkait kerja-kerja kedewanan sebagaimana tupoksi yang ada.

Perhatian politisi perempuan tentang arti penting media relations juga tak pernah dilakukan evaluasi. Hal ini ditandai dengan lemahnya aspek dokumentasi pemberitaan media tentang apa yang pernah diekspose media terkait tugas dan fungsi sebagai anggota legislative. Mereka hampir tidak memiliki dokumentasi yang tertata dan sistematis tentang pemuatan media yang berisikan kegiatan politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah. Adapun dalam membangun relasi dengan media maka terdapat beberapa media cetak dan elektronik sebagai partner untuk mejembatani akuntabilitas kerja politisi perempuan kepada masyarakat, yakni: Suara Merdeka, Jawa Pos, Tribun Jateng, Solo Pos, TVRI, Kompas TV dan Metro TV. Hal ini juga dalam rangka menyosialisasikan hasil kerja dewan.

### **Dinamika Aktivitas Media Relations Politisi Perempuan**

Persoalan yang muncul dalam dinamika media relations adalah berkaitan dengan isi pemberitaan yang diekspose media. Akibatnya politisi perempuan merasa dirugikan dalam pemberitaan, sehingga perlu mengklarifikasi atau meminta wartawan memperbaiki pemberitaan (memanfaatkan hak koreksi dan hak jawab) agar tidak berdampak buruk bagi pribadi politisi perempuan selama menjalankan tugas. Adapun dinamika relasi politisi perempuan dengan media dapat dikategorikan sebagai berikut; *Pertama*, masalah yang sering terjadi dalam relasi politisi perempuan dengan media adalah pemberitaan tentang kegiatan anggota dewan yang tidak komprehensif, apalagi ketika media menyampaikan isi pemberitaan tentang pernyataan politisi perempuan tentang masalah tertentu yang dinilai tidak utuh alias sepotong-sepotong. Hal demikian pernah dialami Sri Yuningsih terkait isi pernyataan dalam berita yang dapat menyinggung teman lain sesama anggota partai.

*Kedua*, pemberitaan media masuk kategori fiktif karena isi pemberitaan tidak dilengkapi data atau bukti factual sehingga dapat merugikan nama politisi tertentu. Hal ini seperti pemberitaan tentang money politics saat Pemilu 2014 yang menerpa Farida (FPG), sehingga harus dilakukan klarifikasi serta koreksi untuk isi pemberitaan pada edisi hari berikutnya.

*Ketiga*, politisi perempuan masih merasakan pemberitaan media yang tidak berimbang (akibat tidak mempraktikkan norma *cover both sides*) terutama isi pemberitaan tentang penilaian positif dan negatif atas kinerja anggota DPRD. Dan *keempat*, politisi perempuan memahami tentang fungsi media adalah untuk mendukung sosialisasi kinerja selaku anggota DPRD yang menjalankan tugas *legislative, budgeting dan controlling* terhadap lembaga eksekutif. Apabila terdapat permasalahan isi pemberitaan maka dilakukan pendekatan komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) dengan wartawan bersangkutan agar dapat dilakukan koreksi dan klarifikasi tentang isi pemberitaan tertentu. Pada akhirnya apabila terdapat permasalahan yang berhubungan dengan isi pemberitaan tentang



kegiatan atau kerja politisi perempuan yang dinilai tidak benar maka mereka memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan wartawan yang bersangkutan.

## **Kesimpulan**

### **1. Akuntabilitas kerja politisi perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Akuntabilitas yang diartikan pertanggungjawaban politisi perempuan selaku anggota legislatif adalah kepada masyarakat selaku pemilih melalui pemilu. Bentuk pertanggungjawaban apa yang dikerjakan dalam tugas selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah maka harus dapat diketahui masyarakat secara luas. Adapun kegiatan maupun produk kebijakan yang berhubungan dengan tugas menjalankan fungsi legislasi, budgeting dan controlling dari politisi perempuan membutuhkan media massa sebagai sarana menyosialisasikan kepada masyarakat. Oleh karena itu media memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi informasi tentang kerja politisi perempuan sekaligus kanalisasi bagi feedback masyarakat atas pertanggungjawaban tersebut.

### **2. Strategi media relations politisi perempuan terdiri dari:**

- a. Strategi personal, yakni politisi perempuan yang memandang peran penting media dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya, maka ia membangun personal relations dengan wartawan berbagai media. Hubungan personal dengan wartawan dibangun dalam kondisi apapun, artinya saat membutuhkan ekspose kegiatan melalui pemberitaan ataupun tidak ada kepentingan pemuatan berita tentang dirinya selaku anggota dewan.
- b. Strategi institusional, yakni DPRD melalui sekretariat dewan membuat kebijakan fasilitasi media relations kepada setiap anggota dewan termasuk perempuan. Fasilitasi dapat diwujudkan dukungan sekretariat melalui bidang humas memfasilitasi kemudahan bagi politisi perempuan untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan wartawan di lingkungan kantor DPRD Jawa Tengah. Dukungan secara kelembagaan maka diselenggarakan:
- c. Media relations sebagai kebutuhan bagi politisi di dewan tidak memperoleh dukungan secara kelembagaan dari partai politik yang memiliki anggota dewan termasuk politisi perempuan. Hal ini disebabkan partai politik menilai kebutuhan media relations bagi politisi di DPRD adalah tidak penting dan dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang bisa dipenuhi pribadi politisi di DPRD Jawa Tengah.
- d. Politisi perempuan secara pribadi atau kelembagaan (parpol) belum memiliki perencanaan strategis untuk aktivitas media relations, karena belum terdapat wacana yang menilai penting peran media dalam dunia politik dan kekuasaan. Hasil media relations lebih karena kesadaran individual politisi perempuan yang dibangun secara otodidak dalam keseharian.

### **3. Aktivitas media relations politisi perempuan**

Aktivitas para politisi perempuan dalam menjalankan kerja di lembaga legislatif tidak akan lepas dari media sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat sekaligus sosialisasi atas pekerjaan yang dilakukan sebagai wujud akuntabilitas kerjanya. Dengan demikian politisi perempuan melakukan media relations diantaranya:

- a. Memiliki kontak person dengan wartawan berbagai media sebagai cara memudahkan berkomunikasi dengan wartawan setiap saat atau ketika terdapat momentum yang memerlukan pemberitaan media.

- b. Mengikutsertakan wartawan pada saat menjalankan tugas seperti kunjungan daerah atau kegiatan reses bersama masyarakat di daerah pemilihan.
  - c. Mengikuti media gathering yang difasilitasi sekretariat dewan agar supaya lebih familier dan komunikatif dengan para wartawan yang ditugaskan meliput kegiatan DPRD Jawa Tengah
  - d. Memberikan statement pers kepada para wartawan ketika terdapat persoalan yang membutuhkan sikap dan pandangan pribadi selaku politisi di DPRD Jawa Tengah.
  - e. Salah satu kelemahan politisi perempuan dalam membangun media relations adalah tidak pernah melakukan evaluasi terhadap hasil media relations, misalnya lemahnya dokumentasi pemberitaan media sebagai dasar mengevaluasi media relations.
  - f. Parpol sebagai institusi asal politisi perempuan secara spesifik tidak pernah membangun media relations sebagai upaya mendukung akuntabilitas kerja di DPRD Jawa Tengah, sehingga tidak terdapat koordinasi untuk mengatur tampilan pemberitaan tentang kegiatan politisi perempuan.
4. Dinamika aktivitas media relations politisi perempuan
- Relasi politisi perempuan dengan media juga sering muncul permasalahan yang menunjukkan dinamika hubungan keduanya, seperti berikut:
- Pemberitaan media tentang kegiatan anggota dewan atau lembaga perwakilan tersebut secara parsial atau tidak berimbang, sehingga mempengaruhi opini publik yang merugikan anggota dewan maupun lembaga DPRD.
  - Isi pemberitaan yang masih sering bersifat fiktif terutama pemberitaan hasil wawancara dengan anggota dewan yang dimuat tidak sesuai dengan isi pernyataan yang dikemukakan pada saat wawancara. Sehingga isi berita menjadi tidak komprehensif.
  - Politisi perempuan apabila menghadapi permasalahan dengan contents media maka mereka sudah menyadari dan mempergunakan hak jawab dan hak koreksi sebagai cara untuk meluruskan pemberitaan yang dinilai tidak benar atau tidak lengkap.
  - Politisi perempuan di DPRD Jawa Tengah sejak terpilih Pemilu 2014 hampir belum pernah menyelenggarakan aktivitas konferensi pers atau press release secara formal atas inisiatif sendiri. Media relations selama ini tergantung inovasi dan keberanian masing-masing politisi perempuan, sehingga yang sering tampil dalam pemberitaan media masih terbatas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwar Arifin. (2011), *Komunikasi Politik*, PT Graha Ilmu, Yogyakarta
- Dennis Mc Quail. (1996), *Teori Komunikasi Massa*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln.ed. 2005. *The Sage Handbook Of Qualitative Research 3<sup>rd</sup> edition*. California: Sage Publication
- Joffé, George. (2014). *Government–media relations in Tunisia: a paradigm shift in the culture of governance?*. Journal of North African Studies Dec 2014, Vol. 19 Issue 5, p615-638.
- Laursen, Bo & Chiara Valentini. (2013). *Media relations in the Council of the European Union: insights into the Council press officers' professional practices*. Journal of Public Affairs 13,p. 230-238. John Wiley & Sons.
- Littlejohn,Stephen W & Karen A.Foss. (2009), *Teori Komunikasi*. Edisi 9 (terj.), Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Ishomuddin (2001), *Diskursus Politik dan Pembangunan*, UMM Press, Malang
- Moleong, Lexy J.(1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurudin. (2008). *Hubungan Media, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Patton, Michael Quinn.(1991) *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS
- Riant Nugroho.(2010), *Perencanaan Strategis in Action*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Sawaliana, A. Rahman. (2010). *Strategi Media Relations Pt Excelcomindo Pratama, Tbk (XI) Membangun Hubungan Dengan Wartawan Dalam Rangka Mensukseskan Program Rp 1 /Detik*. Jurnal Komunikologi Vol.7 No.1 Maret 2010. FIKOM Universitas Esa Unggul: Jakarta.
- Setiawan, Agustinus. (2014). *Strategi Media Relations dalam Mempertahankan Citra Binus University*. Skripsi. Binus University.
- Soetopo HB. (2002).*Metode Penelitian Kualitatif; Dasar Teori dan Penerapannya dalam penelitian*. Surakarta: UNS press.
- Iriantara, Yosai. (2005). *Media Relations*. Bandung: PT Simbiosis rekayasa Media
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.